

ABSTRAK

Aufa Noor Luthfia. 1228010037. 2026. **Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Kecamatan Purwakarta di Kota Cilegon**. Skripsi. Sarjana Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang hadir sebagai bentuk upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konsitusi warga negara terhadap anak dibawah umur. Pada tahun 2016, Kota Cilegon terpilih sebagai pilot project Kartu Identitas Anak di Provinsi Banten dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai implementator utama dalam pembuatan dan penerbitan Kartu Identitas Anak. Namun, dalam pelaksanaanya Kecamatan Purwakarta memperoleh jumlah terendah dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak diantara wilayah kecamatan Kota Cilegon. Maka demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak Kecamatan Purwakarta di Kota Cilegon dengan menyesuaikan persoalan yang berkaitan dengan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pada tingkat kecamatan/kelurahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dalam (Sugiyono, 2022). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Cilegon, Operator SIAK Disdukcapil Kota Cilegon, Kepala Kantor Kecamatan Purwakarta, Operator Kecamatan Purwakarta, Tokoh Masyarakat, serta Masyarakat Kecamatan Purwakarta. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dalam (Sugiyono, 2022).

Hasil penelitian menunjukkam bahwa Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Kecamatan Purwakarta di Kota Cilegon belum berjalan optimal dalam aspek komunikasi dengan tingkat unit perangkat daerah di Kecamatan Purwakarta, informasi yang disampaikan belum menjangkau seluruh masyarakat Kecamatan Purwakarta sehingga tidak ada nya peningkatan kesadaran dari masyarakat, meski sikap petugas sudah merepresentasikan komitmen terhadap kebijakan. Dengan demikian, masih membutuhkan perbaikan komunikasi, sumber daya informasi, dan disposisi pelaksana dalam meningkatkan target kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Purwakarta untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Cilegon.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Kartu Identitas Anak, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.